



IMPLEMENTASI PROGRAM PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KAB. LUWU UTARA

Dwi Yulianto

*Prodi Dirasah Islamiyah, Konsentrasi Perpustakaan dan Informasi Islam, Pasca Sarjana, UIN Alauddin
Makassar, Indonesia*

dwiyulianto977@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan agar mengetahui strategi beserta implementasi program Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Utara beserta dampaknya pada suprastruktur masyarakat. Jenis Penelitian ini memakai metode kualitatif dengan orientasi lapangan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi inklusi sosial di Sosial Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Utara berjalan sesuai standar program dengan menggunakan langkah antara lain penguatan sinergi stakeholder, komunikasi publik, peningkatan kemampuan, monitoring dan evaluasi sehingga dalam program tercipta kegiatan-kegiatan inklusif perpustakaan dan berdampak pada suprastruktur masyarakat antara lain dalam segi pendidikan, pertanian, keagamaan, budaya, teknologi informasi komunikasi, kesehatan serta kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian dampaknya, ada beberapa kelemahan yang ditemukan di lapangan, yakni kekurangan tenaga Pustakawan, kekurangan anggaran dan rangkap jabatan pengelola, sehingga hal-hal demikian perlu dievaluasi secara kompleks untuk efektifitas program dan membuatnya perpustakaan lebih berdampak dengan memberi penekanan-penekanan baik pada program. Hal lain adalah miskomunikasi yang harusnya tidak terjadi antara dinas perpustakaan dengan perpustakaan yang direplikasi secara mandiri hingga inklusi sosial di beberapa perpustakaan desa tak berjalan signifikan. Maka dari itu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Utara perlu mengevaluasi ulang program yang dijalankan untuk membuat perpustakaan lebih berdampak secara luas dan inklusif.

Kata kunci : *Inklusi sosial, Perpustakaan, Strategi Program, Dampak Program*

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya perpustakaan adalah instrumen sebuah negara dalam menumbuhkan kembangkan kualitas sumber daya manusia di suatu negara dalam berbagai sektor entah itu pendidikan, ekonomi, politik, kebudayaan dan banyak hal lagi lewat pengetahuan sehingga terjadilah perubahan sosial (Karim, 2012). Perpustakaan memiliki peran yang begitu penting dalam menyongsong kemajuan suatu bangsa, dalam makna kompleks perpustakaan dapat dipandang sebagai institusi perubahan sosial, budaya, pembangunan serta ilmu pengetahuan juga teknologi (IPTEK) bagi masyarakat, tentu ini menyiratkan pula bahwa pustakawan adalah merupakan agen sosial. Penyelenggaraan Perpustakaan Indonesia mengemban amanat yang terberi dari negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menjadi tempat belajar sepanjang hayat. Sehingga Perpustakaan Nasional turut andil untuk mewujudkan program Nawacita demi Indonesia hebat yaitu menciptakan masyarakat cerdas, inovatif serta kreatif yang berkelanjutan.

Ihwal ini selaras dengan misi Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam resolusi yang dibuat secara bersama untuk pembangunan jangka panjang sampai tahun 2030 yang dikenal dengan program internasional *Sustainable Development Goals* (SDGs). Di Indonesia sendiri SDGs diistilahkan sebagai pembangunan berkelanjutan, terdapat 17 dengan capaian yang sudah terstandarisasi. SDGs tersebut dtelah diikuti oleh 193 Negara di Dunia. Tujuannya antara lain mengatasi kemiskinan, menghindari kelaparan, pendidikan yang berkualitas, kesehatan hidup, egaliter untuk gender, kesejahteraan, air bersih dan sanitasi yang baik, perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja yang layak, industri yang inovatif dan tersedianya infrastruktur, mengurangi kesenjangan secara umum, membangun kota dengan masif, menciptakan komunitas berkelanjutan, menginisiasi konsumsi dan produksi yang penuh dengan tanggung jawab, menangani perubahan iklim, menjaga ekosistem di laut dan pada ekosistem darat, mewujudkan perdamaian dan keadilan demi peradabadian yang tangguh, menjunjung kolaborasi dan kemitraan untuk mencapai tujuan tersebut (Hidayat, 2022).

Dari capaian-capaian tersebut, sebagian besarnya menjadi program yang sedang diselenggarakan oleh perpustakaan-perpustakaan di seluruh Indonesia, program tersebut dikenal dengan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). Dasar konsep dari inklusi sosial di perpustakaan berkaca pada histori Prancis, yakni kemunculan inklusi sosial sebagai respon terhadap titik balik penurunan kualitas kesejahteraan negara-negara di Eropa. Penyebaran konsep inklusi sosial ini terjadi di seluruh wilayah eropa dalam rentang tahun 1980 sampai 1990. Denmark 1995 tanggal 6 sampai 12 Maret tepatnya di Copenhagen diadakan sebuah konferensi tingkat tinggi pembangunan sosial yang terkenal sebagai *Copenhagen Declaration On Social Developmen* di mana para pemimpin saat itu berjanji akan menemukan solusi dan mengatasi kemiskinan, membawa kestabilan dalam hidup masyarakat, menciptakan keamanan dan keadilan bagi masyarakat sebagai tujuan yang paling utama dalam pembangunan.

Pada tahun 2003, deklarasi *World Summit of Information* (WSIS) menyatakan, untuk pembangunan masyarakat yang inklusif adalah harus berpusat pada pembangunan sumber daya manusia. Tiap orang berhak dan dapat menciptakan, mengakses, memakai serta mentransfer informasi dan pengetahuan, sehingga darinya itu setiap komunitas, individu bahkan masyarakat umum dapat memanfaatkan potensi secara maksimal untuk melakukan pembangunan yang

memiliki daya kelanjutan untuk peningkatkan kualitas serta mutu dalam kehidupan. Inklusi sosial merupakan konsep dengan perspektif *system social approach* atau menekankan pada basis kemanusiaan (*humanistic approach*). Iklusifitas yang dipakai dalam perpustakaan, memberi fakta bahwa perpustakaan ialah bagian besar dari sistem sosial kemasyarakatan yang ada. Berdasarkan hal itu perpustakaan dibentuk agar memiliki kebermanfaatan tinggi pada masyarakat. Maka dengan konsepsi tersebut perpustakaan menjelma menjadi sebuah ruang yang sangat terbuka bagi keterlibatan masyarakat memperbaiki kualitas hidupnya, dengan menggunakan pengetahuan (Haryanti, 2019).

Perpustakaan dengan basis inklusi sosial adalah merupakan pendekatan perpustakaan yang proaktif memberikan jalan untuk menemukan solusi untuk individu dan masyarakat untuk melewati persoalan hidup yang dihadapi, serta untuk meningkatkan keterampilan dan kekuatan jiwa yang optimis dan meningkatkan jaringan sosial, perpustakaan mengambil peran untuk mendukung komunitas untuk belajar di perpustakaan. Darinya itu perpustakaan menjadi fasilitator, atau yang memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensi yang dimiliki dengan segala macam perbedaan budaya. Dengan inklusifitas masyarakat akan lebih terbuka dan menerima perubahan serta memberikan tawaran untuk mengambil kesempatan berusaha, memberi perlindungan serta memperjuangkan kebudayaan beserta Hak Asasi Manusia (HAM), ketika perpustakaan melaksanakan hal tersebut ia dapat dikatakan sebagai perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Untuk itulah pada program inklusi sosial perpustakaan yang diselenggarakan BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) bersama Perpustakaan Nasional memberikan perhatian besar kepada perpustakaan yang berada di sekitar masyarakat desa ataupun daerah, seperti misalnya Dinas perpustakaan kabupaten/kota, dua perpustakaan tersebut termasuk dalam bentuk perpustakaan yang tidak eksklusif dan dapat diakses masyarakat secara umum. Perpustakaan umum diperuntukkan bagi masyarakat umum tanpa terkecuali dan memberi fasilitas dan layanan pembelajaran sepanjang hayat, artinya tidak ada permebedaan pada status sosial individu atau masyarakat dalam hal agama, ekonomi, suku, ras maupun status mereka secara sosial.

Dari tahun 2019 tersebut agenda perpustakaan inklusi sosial mulai terimplementasi di beberapa daerah di seluruh Indonesia. Penelitian sebelumnya oleh Husna dengan judul “implementasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di dinas kearsipan dan perpustakaan kota jambi” menemukan bahwa implementasi program perpustakaan berbasis inklusi sosial belum merata, terdapat kendala, walaupun telah ada kemajuan pelayanan secara luas. Strategi implementasi yang dijalankan ialah melibatkan masyarakat dengan mengidentifikasi masalah sesuai kebutuhan hidup masyarakat. Sehingga perpustakaan dapat dikata berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat (Nailul Husna, 2024)

Salah satu perpustakaan yang ikut andil ialah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara, dan telah menyelenggarakan serta mengimplementasikan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dalam layanannya, melakukan pengembangan, distribusi informasi yang merata dalam kesetaraan serta pengembangan *individual skill* masyarakat melalui program bimtek atau pelatihan. Berdasarkan data Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 2020-2022, terdapat beberapa titik daerah dalam pengembangan

perpustakaan inklusi sosial serta fasilitas Teknologi informasi dan komunikasi di Sulawesi Selatan sebagai penunjang kecakapan informasi masyarakat.

Implementasi inklusi sosial di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara dijalankan berdasarkan ketentuan sistem kebijakan serta diikuti beberapa inovasi dari internal perpustakaan, pelaksanaan lain yaitu pemanfaatan bantuan program, perpustakaan keliling, kolaborasi dan beberapa realisasi konkrit lainnya yang menunjang tercapainya tujuan dari program. Penjelasan di atas memberi dasar bagi penelitian dengan fokus kepada bagaimana implementasi program perpustakaan berbasis inklusi sosial di Kabupaten Luwu Utara dalam meningkatkan kehidupan sosial masyarakat Luwu Utara melalui Program Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial secara komprehensif.

TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan hasil-hasil penelusuran oleh peneliti serta upaya mencermati beragam sumber referensi yang memiliki kaitan pada penelitian, maka diantaranya yang dipergunakan sebagai berikut :

1. Reza Mahdi dalam jurnalnya yang berjudul “Perpustakaan Umum Berbasis Inklusi Sosial : Apa dan Bagaimana Penerapannya? (Sebuah Kajian Literatur)” menggambarkan konsep inklusi sosial yang sangat tepat diimplementasikan di perpustakaan umum, yakni bahwa pada perpustakaan umum tak memandang status sosial masyarakat yang menggunakan perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat.
2. Woro Titi Hariyanti dengan jurnalnya yang berjudul “Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial” menjelaskan mengenai histori dari konsep inklusi sosial, dan bagaimana tujuan dari transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Indonesia yang dapat meneguhkan perjuangan bagi hak asasi manusia terutama dalam proses mereka berpengetahuan.
3. Fandi Rahman Hidayat, dkk dalam jurnalnya “Pemanfaatan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Sesuai dengan Tujuan Program SDGs Indonesia 2030” dijelaskan mengenai keterkaitan antara SDGs dan program perpustakaan berbasis inklusi sosial. Perpustakaan mendorong masyarakat dapat berpengetahuan sehingga membawa peningkatan kualitas hidup atau dalam ini kesejahteraan hidup berkelanjutan.
4. Nurul Atik Hamida dengan jurnalnya “Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Untuk Menciptakan Knowledge Society” menjelaskan mengenai bagaimana landasan perpustakaan mengubah masyarakat menjadi *knowledge society*, peran besar ini sangat mungkin diraih melalui perpustakaan sebab perpustakaan sendiri dapat mengelola dan memberikan pengetahuan bagi masyarakat untuk meningkatkan skill dan taraf hidup.
5. Abdul karim menjelaskan perubahan sosial melalui perpustakaan dalam jurnalnya yang berjudul “Perpustakaan dan Perubahan Sosial” bahwa perpustakaan memiliki modal sosial besar sebagai perekayasa perubahan sosial melalui kerja pengetahuan yang dikulturkan. Perubahan-perubahan sosial terjadi atas dasar pengetahuan, dan perpustakaan ikut dalam kontelasi tersebut.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian Sosial Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Utara . Adapun data primernya antara lain :

Tabel 1.1 Daftar Informan

NO.	NAMA	STATUS
I	Yusra	Fasilitator Daerah
II	Anggi Novita	Mahasiswa
III	Selli Kurniawati	Pengelola Perpus Desa
IV	Aswin	Pengelola Perpus Desa
V	Iin Amriani	Pengelola Perpus Desa
VI	Sinta Sari	Pustakawan
VII	Syarif	Pengelola Perpus Mesjid
VIII	Chiko Puspita Yahya	Guru
IX	Ira Widyastuti	PIC (Person in Contact)
X	Rahman	Pengelola Lapas
XI	Jumriati Wahyuddin	Pustakawan
XII	Rosmala	Pustakawan
XIII	Lubis	Pengelola Lapas
XIV	Tito	Jamaah/Pemustaka

Dalam penelitian ini menggunakan langkah pengolahan serta analisis data kualitatif, dengan beberapa langkah antara lain :

- a. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.
- b. Penyajian data (*data display*) Pada penelitian kualitatif, di mana penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
- c. Menarik kesimpulan/verifikasi Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas atau bahkan tidak jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan ini dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, maupun hipotesis atau teori

PEMBAHASAN

Inklusi sosial perpustakaan menggunakan *system social approach* di mana penekanan terhadap pemberdayaan potensi manusia menjadi utama, dan melahirkan *knowledge society* (Hamida, 2023). Darinya itu inklusifitas tersebut mengubah perpustakaan menjadi sentral berjalannya suprastruktur masyarakat antara lain ekonomi, politik, kesehatan, pendidikan dan lain-lain dengan modal sosial dan pengetahuan yang perpustakaan miliki yang dirumuskan dalam kebijakan sehingga memunculkan program dan implementasi yang terselenggara secara nasional.

Beberapa metode yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara akan diuraikan selanjutnya.

A. PELIBATAN MASYARAKAT

Dalam program inklusi sosial, pelibatan masyarakat seharusnya menjadi prinsip utama. Pelibatan masyarakat artinya memberi peran masyarakat pada kerja-kerja perpustakaan disamping menjadikan perpustakaan sebagai pusat kegiatan sosial masyarakat. Hal ini senada dengan yang disampaikan Selly Kurniawati yang menjelaskan pelibatan dirinya dan masyarakat dalam kegiatan literasi perpustakaan :

kami mengadakan kelas bahasa di perpustakaan desa Citra Mandiri, biasanya siswa-siswa yang terlibat ada sekitar 15 orang, dengan sering berbaurnya masyarakat dengan kegiatan-kegiatan di perpustakaan maka masyarakat akan terbiasa pada hadirnya perpustakaan.

Pelibatan masyarakat menjadi agenda besar program yang dijalankan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Utara, meskipun telah menjadi prosedur dalam program akan tetapi diusahakan secara terus-menerus untuk memperluas cakupannya. Tentu atas kepentingan bahwa tujuan program inklusi sosial dapat diraih secara nyata.

B. REPLIKASI MANDIRI

Dengan jumlah 30 mitra replikasi mandiri dalam implementasinya dalam program perpustakaan berbasis inklusi sosial dengan beberapa jenis perpustakaan yaitu perpustakaan lapas, perpustakaan rumah ibadah dan didominasi perpustakaan desa, dilaksanakan replikasi atau penggandaan untuk menyalurkan bantuan serta pengetahuan dengan melakukan pelatihan pada para mitra untuk melancarkan program yang dijalankan, berikut daftar mitra akan disuguhkan dalam tabel :

Tabel 1.2 Daftar Mitra Dinas Perpustakaan

No.	Nama Perpustakaan	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Mitra Sejak
1	Perpustakaan Desa Pince Pute	Malangke	Pince Pute	2024
2	Perpustakaan Teras Ilmu Desa Sidomukti	Bone Bone	Sidomukti	2024
3	Perpustakaan Patoloan	Bone Bone	Patoloan	2023
4	Perpustakaan Bantimurung	Bone Bone	Bantimurung	2021
5	Perpustakaan Kelurahan Kappuna	Masamba	Kappuna	2023
6	Perpustakaan Pojok Indah	Masamba	Bone	2024
7	Perpustakaan Kelurahan Bone	Masamba	Bone	2023
8	Perpustakaan Padang Biru Kelurahan Baliase	Masamba	Baliase	2024
9	Perpustakaan Desa Baloli	Masamba	Baloli	2022
10	Perpustakaan Mappewelo	Masamba	Rompu	2024

11	Perpustakaan Lantang Tallang	Masamba	Lantang Tallang	2023
12	Perpustakaan Masamba	Masamba	Masamba	2023
13	Perpustakaan Pintar Desa Pandak	Masamba	Pandak	2024
14	Perpustakaan Toradda	Masamba	Toradda	2023
15	Perpustakaan Kamiri	Masamba	Kamiri	2023
16	Perpustakaan Desa Pengkendekan	Limbong	Pengkendekan	2022
17	Perpustakaan Desa Kaluku	Sukamaju	Kaluku	2024
18	Perpustakaan Pao	Malangke Barat	Pao	2020
19	Perpustakaan Arusu	Malangke Barat	Arusu	2021
20	Perpustakaan Mamesa Desa Uraso	Mappedeceng	Uraso	2024
21	Perpustakaan Cendana putih dua	Mappedeceng	Cendana Putih II	2021
22	Perpustakaan Tarobok	Baebunta	Tarobok	2023
23	Perpustakaan Mario	Baebunta	Mario	2023
24	Perpustakaan Desa Kariango	Baebunta	Kariango	2022
25	Perpustakaan Palandan	Baebunta	Palandan	2023
26	Perpustakaan Desa Karondang	Tana Lili	Karondang	2022
27	Perpustakaan Munte	Tana Lili	Munte	2021
28	Perpustakaan Sidomakmur	Tana Lili	Sidomakmur	2021
29	Perpustakaan Batu Alang	Sabbang Selatan	Batualang	2021
30	Perpustakaan Batu Alang	Sabbang Selatan	Batualang	2021

(Sumber data : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara)

Implementasi program perpustakaan berbasis inklusi sosial melibatkan 30 perpustakaan dengan berbagai jenis yang didominasi oleh perpustakaan desa dan tersebar di setiap Kecamatan yang berada di Kabupaten Luwu Utara.

C. PENINGKATAN KEMAMPUAN (*CAPACITY BUILDING*)

Meningkatkan kapasitas memerlukan transfer pengetahuan sebagaimana tujuan dari program, maka dilakukan dengan langkah membuat kegiatan *capacity building* yang disampaikan oleh *Master Trainer* kemudian diambil alih oleh fasilitator daerah. Upaya peningkatan kapasitas dicurahkan melalui bimbingan teknis. Yusra selaku fasilitator daerah menjelaskan bahwa :

Dinas perpustakaan luwu utara memfasilitasi pengelola perpustakaan utamanya perpustakaan desa dengan mendatangkan master trainer atau pustakawan provinsi dengan mengadakan bimbingan teknis.

Sebelum diambil alih, Dinas perpustakaan daerah mendatangkan pihak pelatih (*Master trainer*) dari provinsi dan dilanjutkan oleh fasilitator daerah. Peran master dan fasilitator daerah hampir sama yaitu memfasilitasi kemampuan dalam program dan dilanjutkan dengan pemantauan perkembangan dari peserta yang terlibat.

D. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (SIM)

Analisis perkembangan dari pelatihan maupun pada efektifitas implementasi memudahkan dengan pengaplikasian Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang dapat mengakomodasi data-data perpustakaan yang tereplikasi secara mandiri dengan kuantifikasi dan standar yang telah ditentukan. Yusra menjelaskan pentingnya penggunaan SIM untuk efisiensi capaian program :

Menggunakan aplikasi SIM untuk mempermudah kami melakukan monitoring dan evaluasi mitra perpustakaan, ini bentuknya aplikasi yang dipakai dalam manajemen perpustakaan berbasis inklusi sosial baik secara internal maupun bagi para mitra. Dalam aplikasinya ini banyak fitur yang tersedia misalnya jenis perpustakaan dan banyak lagi, jadi setelah data mereka terinput akan muncul laporan otomatis dengan tanda warna merah, kuning atau hijau sesuai capaian nilai yang sudah jadi indikator dalam aplikasi.

Disamping pengawasan perkembangan perpustakaan melalui SIM diikuti dengan langkah monitoring dan evaluasi, yakni dengan melaksanakan kunjungan secara langsung dan melakukan rapat koordinasi berkala. Memebrikan peluang kepada setiap pustakawan untuk dapat berkompromi dan berkesepahaman atas program bersama dengan perpustakaan-perpustakaan yang dinaungi. Evaluasi lain program akan dilaksanakan secara langsung maupun mengadakan pertemuan-pertemuan nasional, yang dengan itu memperlihatkan capaian dan skor program yang telah dicapai oleh dinas perpustakaan daerah Kabupaten Luwu Utara beserta perpustakaan-perpustakaan yang menjadi mitra yang diperoleh melalui SIM.

E. MONITORING DAN EVALUASI

Untuk mengetahui capaian-capaian program, kendala beserta tantangan yang dihadapi konkrit, hal ini secara sistematis berjalan dalam skala nasional maupun daerah agar dapat menjadi pembelajaran bersama mengenai peluang pengembangan program. Hal tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan Ira Widyastuti yang menjelaskan terkait cara memonitoring dan mengevaluasi :

Kami biasa mendampingi mitra apabila menghadapi kendala di perpustakaanannya, selain itu kami melakukan pembinaan kepada mereka dalam waktu yang panjang sampai mereka mengerti bagaimana alur kerja inklusi sosial

Kunjungan atau survey langsung selain mendampingi berjalannya program inklusi sosial adalah juga untuk mengetahui pemanfaatan bantuan-bantuan yang diinisiasi oleh Perpustakaan Nasional berupa buku, rak, komputer dan *Smart TV*. Bantuan itu merupakan alat untuk peningkatan literasi dan penggunaan pengetahuan dan informasi masyarakat secara efektif. Pemanfaatannya cukup beragam namun tetap melihat tingkatan usia, seperti halnya ketika anak-anak menggunakannya maka akan mendapatkan layanan khusus dari pengelola perpustakaan, Jumriati Wahyuddin memberikan pendapat akan hal itu :

Komputer di dinas perpustakaan sering sekali dimanfaatkan oleh anak-anak untuk mengakses informasi namun tetap didampingi oleh pustakawan.

Untuk lebih memperluas cakupan manfaat dan memberi informasi kepada masyarakat serta calon pemakai, komunikasi publik sangat fundamental, model komunikasi yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara yaitu melaksanakannya secara langsung dan memanfaatkan media sosial untuk memberikan informasi terbaru dari program dan layanan yang dilaksanakan. Sejalan dengan itu Rosmala menjelaskan :

Promosi secara langsung atau sosialisasi mendatangi pihak-pihak diluar perpustakaan, juga memanfaatkan media sosial seperti facebook dan banyak lagi.

Monotoring dan evaluasi menjadi begitu penting dalam mengetahui kendala dan peluang serta kepentingan menyusun rencana untuk mencapai tujuan program, sehingga ditemukan formulasi yang tepat misalnya melakukan komunikasi publik agar program kian diketahui dan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.

F. KOLABORASI DENGAN KOMUNITAS, LEMBAGA DAN ISNTANSI

Program inklusi sosial membutuhkan basis massa dengan kerja kolaboratif dari berbagai kalangan, dengan melibatkan berbagai segmen masyarakat dalam kontur sosial, antara lain instansi di luar perpustakaan, lembaga dan komunitas-komunitas masyarakat. IFLA mengajukan peran perpustakaan umum sebagai ruang bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan status sosialnya, sehingga pembangunan kualitas masyarakat melalui pengetahuan dapat holistik (Mahdi, 2023). Luasnya cakupan itu membutuhkan kerja kolaboratif antara perpustakaan dan aktor-aktor sosial masyarakat, yang memungkinkan kesalingterhubungan satu sama lain. Hal itu dijelaskan oleh Rosmala sebagai usaha mengaktifkan gerakan komunitas :

Ruang perpustakaan disediakan untuk para komunitas dalam berkegiatan bahkan halaman dinas digunakan pula oleh komunitas untuk melaksanakan kajian rutin dan bincang-bincang perkara agama.

Keberadaan komunitas menjadi entitas penting bagi kinerja program inklusi sosial perpustakaan, kekuatan komunitas dapat membantu perpustakaan dalam kolaborasinya dan pustakawan memfasilitasi aktivitas-aktivitas baik masyarakat dan perpustakaan akan semakin memasyarakat pula dengan hilangnya batas keengganan yang menganggap perpustakaan terlalu formal ketika dimanfaatkan.

G. TANTANGAN DAN KENDALA

Dengan dilaksanakannya program inklusi sosial perpustakaan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara, dengan beragam peristiwa dan kegiatan yang dilalui, terdapat beberapa kendala-kendala penting yang bersifat substansial. Implementasi perpustakaan berbasis inklusi sosial diharapkan bekerja secara meritokratis (Agil Sabani, 2024), artinya yang menjadi pelaksana program tentu adalah seorang ahli, kendala datang dari kekurangan tenaga profesional pustakawan dan berpengaruh pada kinerja dan sinergitas dalam prgram. Sehingga Yusra mengatakan bahwa :

Dua orang pustakawan ahli telah mutasi ke makassar sehingga dibutuhkan kembali pustakawan baru melalui inpassing sebanyak 5 orang sehingga pembekalan pemahaman tentang program perpustakaan berbasis inklusi sosial dibekali dari awal.

Kendala lawas semacam ini tentu terjadi di berbagai perpustakaan, soal sumber daya manusia perpustakaan yang seyogyanya memumpuni agar program berjalan dengan sangat efektif, hal lain yakni masalah anggaran, yang notabene kerja sosial tentunya mempunyai nilai yang besar dengan anggaran yang tak sedikit pula, hal di atas didukung oleh Ira Widyastuti dengan mengatakan bahwa :

Banyak pengelola perpustakaan dengan kompetensi kurang dikarenakan pustakwan yang ada merupakan pustakwan inpassing bukan yang berasal dari keilmuan perpustakaan. Selain itu, keterbatasan anggaran untuk perpustakaan daerah sangat minim.

Problematika program perpustakaan inklusi sosial masih didapatkan, tentu dibutuhkan evaluasi dari berbagai pihak secara nasional, sebab akan berdampak pada kelancaran implementasinya. Keberadaan perpustakaan dengan inklusi sosial dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat dalam menjelajahi dan mempraktikkan pengetahuan untuk kebermanfaatannya praktis dalam kehidupan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa point inisi mengenai implementasi program inklusi sosial Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Utara, antara lain :

1. Pelibatan Masyarakat menjadi langkah yang sangat penting untuk menjadikan program dapat inklusif tanpa bersusah payah program akan otomatis berjalan dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam kerja-kerja pengetahuan dari perpustakaan dan masyarakat akan menganggap perpustakaan adalah bagian dari mereka.
2. Replikasi Mandiri singkatnya yakni menjalin hubungan secara formal maupun kultural agar program perpustakaan berbasis inklusi sosial dapat diinternalisasi oleh para mitra yang tergabung, replikasi mandiri membuka peluang bagi para mitra untuk mendapatkan bantuan, pendampingan dan arahan serta kompromi untuk memajukan masyarakat bersama-sama.
3. Peningkatan Kemampuan dilakukan dengan pengadaan bimbingan teknis, agar para pengelola perpustakaan desa dan sebagainya dapat mengetahui tujuan dan metode dalam mencapai tujuan inklusi sosial sehingga memiliki dampak bagi masyarakat.
4. Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah perangkat penting bagi program, sebab data-data dan laporan statistik dan partikular mengenai perkembangan perpustakaan yang berada dalam naungan dapat diketahui, SIM adalah bagian integral dalam monitoring dan evaluasi.
5. Monitoring dan Evaluasi ialah melakukan pendampingan serta pengadvokasian langsung untuk mengetahui realitas program dan akan didapatkan kendala beserta peluang yang akan ditimbang dalam menyusun rencana yang akan diimplementasikan pada program kedepannya.
6. Kolaborasi komunitas, lembaga dan instansi membuat program inklusi sosial di dinas perpustakaan berjalan dengan lancar sebab kerja kolaboratif menambah agensi dari perpustakaan berbasis inklusi sosial yang darinya itu memperluas pula cakupannya sebab ada beragam kegiatan pengetahuan yang dapat dilaksanakan oleh dinas perpustakaan.

7. Tantangan dan Kendala, setiap program khususnya perpustakaan berbasis inklusi sosial memiliki tantangan dan kendala, salah satunya adalah kekurangan tenaga profesional pustakawan dan anggaran bagi gerak sosial perpustakaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agil Sabani, dkk. (2024). Pentingnya Implementasi Sistem Meritokrasi Dalam Instansi Pemerintahan Indonesia. *Aktivisme : Jurnal Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, 146.
- Hamida, N. A. (2023). Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Untuk Menciptakan Knowledge Society,15(1). *Pustakaloka, Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan*, 106.
- Haryanti, W. T. (2019). Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. *TALENTA Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts*, 2(2).<https://talentaconfseries.usu.ac.id/lwsa/article/view/728>, 117.
- Hidayat, F. R. (2022). Pemanfaatan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dalam, 29(3). *Media Pustakawan*, 312.
- Karim, A. (2012). Perpustakaan dan Perubahan Sosial, 6(1). *Jurnal Iqra'*, 66.
- Mahdi, R. (2023). Kolaborasi Perpustakaan Umum dan Masyarakat dalam Pengembangan Masyarakat, 32(2),. *Media Informasi*, 224.
- Nailul Husna, dkk. (2024). Implementasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Dinas Perpustakaan Kota Jambi. *Nazharat : Jurnal Kebudayaan*, 30(1), 108.